KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bukan Hanya BKKBN - Turunkan Stunting Jadi Tugas Bersama
Tanggal : Jumat, 01 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Bukan Hanya BKKBN

Turunkan Stunting Jadi Tugas Bersama

ANGGOTA Komisi IX DPR Kris Dayanti berharap target menurunkan angka stunting di level 14 persen tahun ini merupakan tugas bersama. Seluruh kementerian dan lembaga punya andil, sebab tugas menangkal kekurangan gizi pada anak itu punya pendekatan multisektor.

"Kami (Komisi IX) menekankan kepada seluruh kementerian dan lembaga, jadi bukan hanya BKKBN saja (leading), tapi seluruhnya dapat terlibat. Hal ini melibatkan banyak pihak dan kita harus semangat," ujarnya saat ditemui usai Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024).

Meski di masa depan ada rencana program makan gratis, legislator yang akrab disapa KD ini bilang, masyarakat juga berhak tahu apakah nilai nutrisi dari makanan tersebut sudah mencukupi kebutuhan anak-anak.

Di Tanjungpinang, tim kunjungan Komisi IX menemukan paparan dari pemerintah kota bahwa angka stunting di kota ini berhasil turun di tahun lalu.

Menanggapi hal itu, KD tetap optimistis penurunan stunting akan diikuti oleh banyak daerah. Namun, dia berharap klaim tersebut dapat dicek kembali.

"Dalam banyak kunjungan kerja kami, memang Pemerintah Daerah selalu klaim (angka stunting) di bawah nasional. Ini tugas kami mengecek dengan detail. Tetapi kami optimistis menyelesaikan di periode ini (pengawasan stunting)," urai Politisi PDI-Perjuangan ini.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengapresiasi penurunan angka stunting yang signifikan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Turunnya angka stunting itu merupakan hasil dari model penanganan terintegrasi yang dilakukan Pemda Kepri.

Dalam menurunkan angka stunting, Kepri melibatkan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Pengusaha daerah ini ikut berkontribusi menjadi orang tua angkat bagi anak-anak stunting. Langkah ini, dinilai sangat membantu penurunan angka stunting di Kepri.

"Jadi pengusaha-pengusaha itu ikut berkontribusi melakukan intervensi sensitifnya. Umpamanya, banyak dari pengusaha-pengusaha yang jadi orang tua angkatnya (bagi) anak-anak stunting, dan itu sangat menolong," jelasnya.

Selain melibatkan pengusaha untuk mengintervensi langsung,



Kris Dayanti

Pemda Kepri juga mengambil inisiatif seperti dengan melibatkan pengusaha untuk membantu operasional Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Langkah ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lain.

"Ini juga barangkali bisa menjadi contoh buat daerah lain agar pemerintah daerah itu sama-sama ikut bertanggung jawab mengatasi masalah stunting. Karena ini penanganan stunting di daerah itu menjadi salah satu parameter juga sekarang untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah," lanjut Politisi Fraksi Golkar tersebut.

Selain penanganan stunting, Darul Siska juga menyoroti masih belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan di Kepri. Ketimpangan itu diseb abkan masih banyaknya dokter yang ada di Kota Batam, sementara daerah lain di Kepri jumlah dokter masih sangat minim.

Di Kota Batam, tenaga kesehatan sangat berlebih (jumlahnya), baik dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Sementara daerah-daerah yang kepulauan itu sangat minim.

"Kita berharap pemerintah daerah provinsi membuat kebijakan, sehingga ada pemerataan tenaga kesehatan, terutama dokter-dokter spesialis yang semestinya ada di semua rumah sakit-rumah sakit di kabupaten/kota," harapnya.

Diketahui, dari total 11.592 tenaga medis di Kepri, sebanyak 4.641 tenaga medis berada di Kota Batam, sedangkan sisanya tersebar di 6 kabupaten/kota lainnya di Kepri.

Sementara itu, dengan angka prevalens ahun 2022, Kepri menduduki peringkat ke-4 terendah nasional setelah Lampung, DKI Jakarta, dan Bali. ■ KAL

Speaker Quote

Kami (Komisi IX) menekankan kepada seluruh kementerian dan lembaga, jadi bukan hanya BKKBN saja (leading), tapi seluruhnya dapat terlibat. Hal ini melibatkan banyak pihak dan kita harus semangat.

■ **Kris Dayanti,** Anggota Komisi IX DPR